

BADAN MUTU KKP YOGYAKARTA JEMPUT BOLA Pastikan Penerapan CPIB Di Kapal Perikanan



Inspeksi kapal perikanan yang melakukan pembongkaran ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap

YOGYA (KR) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menekankan pentingnya mutu perikanan mulai dari hulu. Khusus untuk kegiatan penangkapan ikan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan (Badan Mutu KKP) menyiapkan sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di atas kapal untuk menjaga kualitas dan nilai gizi ikan usai ditangkap.

"Kualitas bahan baku di hulu akan mempengaruhi produk akhir yang berdampak pada mutu, keamanan dan penerimaan produk perikanan," kata Kepala Badan Mutu KKP, Ishartini di Jakarta, Jumat (31/1).

Dalam penerapan CPIB di atas kapal ikan, Ishartini menyebut jajarannya bergerak ke pelaku usaha untuk melakukan inspeksi dengan metode observasi langsung, wawancara kepada awak kapal, dan pemeriksaan dokumen terkait. Aspek yang diperiksa meliputi kegiatan pembongkaran ikan, fasilitas penanganan dan/atau penyimpanan pada kapal perikanan, prosedur penanganan dan/atau penyimpanan pada kapal perikanan serta penerapan HACCP.

"Kami memastikan penerapan CPIB di atas kapal penangkap ikan, khususnya untuk memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan yang ditetapkan oleh buyer," terangnya.

Terkini, menindaklanjuti arahan Ke-

pala Badan Mutu KKP Pusat terkait penerapan CPIB diatas kapal perikanan, Maria Tresia Sundah yang saat ini menjabat Plt. Kepala Badan Mutu KKP Yogyakarta melibatkan pendampingan dari personel quality control (QC) Unit Pengolahan Ikan (UPI) dalam proses inspeksi pada kapal perikanan yang melakukan pembongkaran ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap pada tanggal 17 Januari 2025. Menurut Maria, seluruh jajaran Badan Mutu KKP di daerah senantiasa mendukung program pemerintah dalam mengembangkan sektor perikanan, khususnya bidang mutu dan keamanan pangan dalam menjaga keberterimaan pasar demi kelangsungan mata pencaharian masyarakat perikanan Indonesia.

Dalam kesempatan ini, Ishartini mengajak pelaku usaha untuk selalu menjaga mutu produk perikanan. Dia menegaskan Badan Mutu KKP selalu siap untuk memberikan pendampingan agar mereka bisa menerapkan standar yang sudah ditetapkan, baik oleh pemerintah maupun buyer dari negara tujuan ekspor.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya pengawasan produk perikanan sejak awal. Baik air, pakan, hingga kualitas daging sebelum sampai ke konsumen. (*)

HADAPI PERSAINGAN DI INDUSTRI PARIWISATA Anggota IINTOA Wajib Datangkan Wisman



Paul Edmundus bersama Agustin Peranginangin pada pembukaan Munas di Hotel Santika.

YOGYA (KR) - Ketatnya persaingan dalam industri pariwisata memotivasi Indonesia Inbound Tour Operator Association (IINTOA) untuk meningkatkan kontribusinya dalam mendatangkan wisatawan mancanegara (Wisman) ke Tanah Air. Semua itu akan bisa diwujudkan apabila pengelola destinasi tidak hanya menyiapkan kemudahan akses dan sarana prasarana yang baik, tapi juga SDM yang berkualitas serta kompeten. Dengan begitu wisatawan termasuk dari mancanegara bisa merasa aman dan nyaman saat berada di Indonesia.

"Anggota IINTOA berkeajiban mendatangkan wisatawan luar negeri ke Indonesia sebanyak-banyaknya, untuk membantu realisasi target yang telah ditetapkan pemerintah. Karena pada 2025 kunjungan wisatawan asing ke Tanah Air bisa mencapai 16 juta dan 23,6 juta pada 2029 mendatangi. Memang tidak mudah, tapi saya optimis dengan adanya peran aktif dari anggota IINTOA dan dukungan semua pihak hal itu akan bisa diwujudkan," kata Ketua Umum IINTOA, Paul Edmundus Talo disela-sela Musyawarah Nasional (Munas) ke-2 IINTOA di Hotel Santika Yogyakarta, Minggu (2/2).

Paul mengungkapkan, sejumlah upaya terus dilakukan untuk mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Salah satunya dengan mengencangkan kerja sama dengan sebanyak-banyaknya inbound tour operator di negara-negara asal wisatawan. Seperti kerjasama dengan Thailand, Vietnam dan India, selama 2020-2025 yang sudah dilakukan secara intens. Kendati demikian pihaknya tidak memungkir situasi pandemi Covid-19 sempat menjadi pukulan bagi IINTOA. Terutama, sejak ditutupnya internasional border bagi wisatawan mancanegara pada April 2020.

Dalam kesempatan itu Direktur Utama Badan Otorita Borobudur (BOB), Agustin Peranginangin menyatakan, Munas IINTOA menjadi penghargaan bagi Yogyakarta yang memiliki banyak potensi untuk dipasarkan secara internasional. Bahkan potensi itu tidak hanya sebatas pada kekuatan destinasi, tapi juga suport dari infrastruktur dan konektivitas Yogyakarta yang sudah sangat baik.

sional Airport (YIA) yang bisa menampung pesawat besar. Apalagi kesiapan itu juga ditunjang dengan industri pariwisata seperti perhotelan di kawasan otorita Borobudur. Semoga peluang ini bisa ditangkap oleh IINTOA, agar dapat dipromosikan ke internasional," paparnya. (Ria)-f

YOGYA (KR) - Pasangan usia subur (PUS) di Kota Yogya didorong mengikuti program Keluarga Berencana (KB) yang digulirkan pemerintah. Upaya tersebut sebagai bagian untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan angka kelahiran.

Analisis Kebijakan Ahli Muda Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogya Ummatul Baroroh, menjelaskan secara capaian di tahun 2024 peserta KB aktif meningkat tapi secara jumlah menurun.

"Kalau jumlah angkanya itu turun karena ada PUS yang hulus. Usia PUS itu kan 15 sampai 49 tahun, jadi ada yang menopause dan ada juga yang memutuskan untuk menambah anak sehingga bukan tidak lagi menjadi peserta

KB aktif," imbuhnya.

Teratat jumlah PUS di Kota Yogya pada tahun 2023 sebanyak 39.074 pasangan dengan kepesertaan KB aktif 63,51 persen. Sementara di tahun 2024 menjadi 37.870 pasangan dengan tingkat kepesertaan KB aktif 62,80 persen. Pihaknya menyatakan, cakupan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) menggunakan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) sepanjang tahun 2024 sebanyak 1.957 akseptor.

"KB MKJP yang paling banyak dipilih adalah IUD, setelah itu baru metode implan. Selanjutnya MKJP Metode Operasi Wanita (MOW) atau tubektomi dan Metode Operasi Pria (MOW) atau vasketomi. Tentunya kesadaran masyarakat PUS harus terus didorong agar lebih memilih KB MKJP dibandingkan KB tradisional ataupun metode jangka

pendek," imbuhnya.

Sejauh ini, lanjut Umma, sosialisasi MKJP terus dilakukan di tiap wilayah baik melalui tenaga kesehatan di puskesmas maupun kader KB. Setiap ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kehamilan, diberikan edukasi tentang metode KB yang bisa dipilih setelah melahirkan. "Di fasilitas kesehatan tingkat pertama, setiap ibu hamil di trimester pertama diberitahu apa saja metode KB, kemudian trimester kedua mulai pemantauan, setelah melahirkan mau menggunakan KB apa," tandasnya.

Dirinya mengatakan, untuk mengakses KB MKJP, PUS dengan BPJS bisa mengaksesnya gratis di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau selanjutnya. Sementara PUS yang bukan peserta BPJS atau mandiri, juga bisa mengakses KB MKJP secara gratis melalui

layanan dari DP3AP2KB Kota Yogya. "Layanan MKJP gratis dari Pemkot secara reguler setidaknya satu bulan sekali di fasilitas kesehatan yang sudah bekerja sama baik itu puskesmas, RSUD, rumah sakit swasta atau klinik dan juga praktik bidan mandiri. Kami juga akan berikan fasilitas tambahan bagi akseptor seperti konsumsi dan biaya transportasi," terangnya.

Umma berharap, bagi PUS yang sudah mengakses KB MKJP juga bisa membagikan pengalamannya ke PUS lain di sekitarnya. Sehingga ada informasi berantai dari mulut ke mulut untuk mengajak PUS melakukan KB. "Dari DP3AP2KB juga ada petugas KB di masing-masing kemitraan yang mendorong dan mengajak PUS untuk merencanakan kehamilan, jumlah anak dan jarak kelahiran untuk menuju keluarga yang berkualitas," jelasnya. (Dhi)-f

UPAYA KENDALIKAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK Pasangan Usia Subur Didorong Ikut Program KB

YOGYA (KR) - Pasangan usia subur (PUS) di Kota Yogya didorong mengikuti program Keluarga Berencana (KB) yang digulirkan pemerintah. Upaya tersebut sebagai bagian untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan angka kelahiran.

KB aktif," jelasnya, Minggu (2/2). Teratat jumlah PUS di Kota Yogya pada tahun 2023 sebanyak 39.074 pasangan dengan kepesertaan KB aktif 63,51 persen. Sementara di tahun 2024 menjadi 37.870 pasangan dengan tingkat kepesertaan KB aktif 62,80 persen. Pihaknya menyatakan, cakupan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) menggunakan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) sepanjang tahun 2024 sebanyak 1.957 akseptor.

"KB MKJP yang paling banyak dipilih adalah IUD, setelah itu baru metode implan. Selanjutnya MKJP Metode Operasi Wanita (MOW) atau tubektomi dan Metode Operasi Pria (MOW) atau vasketomi. Tentunya kesadaran masyarakat PUS harus terus didorong agar lebih memilih KB MKJP dibandingkan KB tradisional ataupun metode jangka pendek," imbuhnya.

Sejauh ini, lanjut Umma, sosialisasi MKJP terus dilakukan di tiap wilayah baik melalui tenaga kesehatan di puskesmas maupun kader KB. Setiap ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kehamilan, diberikan edukasi tentang metode KB yang bisa dipilih setelah melahirkan. "Di fasilitas kesehatan tingkat pertama, setiap ibu hamil di trimester pertama diberitahu apa saja metode KB, kemudian trimester kedua mulai pemantauan, setelah melahirkan mau menggunakan KB apa," tandasnya.

Kusnanto Dipercaya Pimpin FKJR Ingin Mengembangkan Anggota Lewat UMKM

YOGYA (KR) - Ir Kusnanto MM dilantik sebagai Ketua Umum Forum Komunikasi Jogja Raya (FKJR) periode 2021-2026 meneruskan kepemimpinan ketua umum sebelumnya yaitu Kanjeng Suryo yang meninggal dunia beberapa waktu lalu.

Pengukuhan dan pelantikan ditandai dengan penyerahan pataka oleh Dewan Pembina FKJR Drs Untung Sukaryadi kepada Kusnanto di halaman Kampus Pusat Homeschooling HSPG Yogyakarta, Sabtu (1/2). Acara pelantikan dilakukan internal dihadiri ratusan anggota FKJR serta sejumlah undangan dari Polda DIY, Polresta Yogyakarta dan Kodim Kota Yogyakarta.

Kusnanto mengatakan, seharusnya estafet kepemimpinan organisasi turun ke wakil ketua umum, namun para anggota melalui musyawarah mufakat meminta Kusnanto (saat itu sebagai Ketua Dewan Pengawas FKJR) untuk menjadi ketua umum.

"Dengan dukungan penuh seluruh anggota saya menerima dan akan melaksanakan amanah ini dengan sungguh-sungguh," terang Ketua Harian Federasi Yoganodo Indonesia (FYI) Pengda DIY ini. Turut hadir memberikan sambutan Seseqah FKJR RM Acun Hadiwijoyo (Ndoro Acun) dan Kasatlantas Polresta Yogyakarta Kompol Maryanto.



Kusnanto (tiga dari kanan) bersama seseqah dan Dewan Pembina FKJR, serta tamu undangan.

visi misi organisasi FKJR dengan terus bersinergi dengan TNI Polri dalam mewujudkan keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat DIY. Menurutnya, selain akan melanjutkan program-program unggulan FKJR seperti

bakti sosial, Kusnanto juga akan memberdayakan para anggota di bidang ekonomi. "Saya ber cita-cita mengembangkan anggota melalui organisasi FKJR. Caranya dengan menciptakan usaha-usaha skala UMKM yang dikelola

oleh para anggota, baik di tingkat kabupaten/kota hingga kecamatan," ujar Kusnanto yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua 1 Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif, serta Bendahara Umum DPP FK-PKBM Indonesia.

Lebih lanjut dikatakan Kusnanto, program kerja jangka pendek yang akan dilakukan Kusnanto adalah melakukan konsolidasi dan restrukturisasi organisasi.

"Sebagai organisasi besar dengan jumlah anggota mencapai 6.000 orang, saya optimis FKJR akan terus maju dan berkembang, tidak hanya di DIY saja tapi bisa meluas ke Jawa Tengah dan Jawa Timur," pungkasnya. (Dev)-f